

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) PADA KPP PRATAMA
GIANYAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : DEWA RAMAYUDA TIRTA
NIM : 1915644128**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) PADA KPP PRATAMA GIANYAR

Dewa Ramayuda Tirta
1915644128

(Program Studi Diploma IV Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta memperbarui basis data. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) bukan hanya dalam jangka pendek atau pada saat program pengungkapan sukarela diterapkan tetapi juga dalam jangka panjang yaitu meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) pada KPP Pratama Gianyar dengan menggunakan penerimaan pajak sebagai indikator kepatuhan pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 sampel data penerimaan pajak. Penentuan sampel menggunakan metode Quota sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda T-test dengan sampel berpasangan (*Paired T-test*) dengan menggunakan *software IBM SPSS Statistics 25*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) pada KPP Pratama Gianyar yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan didukung dengan adanya kenaikan rata-rata penerimaan pajak sebelum diterapkannya PPS sebesar 527,9727 menjadi 666,1182 sesudah diterapkannya program pengungkapan sukarela.

Kata kunci: program pengungkapan sukarela (PPS), kepatuhan pajak, penerimaan pajak

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) PADA KPP PRATAMA
GIANYAR**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Diploma IV
Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : DEWA RAMAYUDA TIRTA
NIM : 1915644128**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINAL KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dewa Ramayuda Tirta

NIM : 1915644128

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada KPP Pratama Gianyar

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.

Tanggal Uji : 16 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung,



Dewa Ramayuda Tirta

SKRIPSI

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PAJAK SEBELUM
DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA (PPS) PADA KPP PRATAMA GIANYAR**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DEWA RAMAYUDA TIRTA

NIM : 1915644128

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I,

DOSEN PEMBIMBING II,



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**



Wayan Hesadjaya Utthavi, S.E.,M.Si.
NIP. 198511052014041001

Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001

Jurusan Akuntansi
Ketua Jurusan,



I Made Sudana, S.E.,M.Si
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) PADA KPP PRATAMA GIANYAR

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 Agustus 2023.

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.
NIP. 198511052014041001



ANGGOTA:



2. Kadek Dian Jatiwardani, S.S.T.Ak.,M.Si
NIP. 202111002

JURUSAN AKUNTANSI
JURUSAN TEKNIK NEGERI BALI
INSTITUT TEKNOLOGI NEGERI BALI



3. Drs. I Made Sarjana., M.Agb
NIP. 195912311989101001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali. (sesuaikan dengan masing-masing prodi)
4. Wayan Hesadjaya Utthavi, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Daftar Isi

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	23
C. Kerangka Pikir	26
D. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel Penelitian	31
D. Variabel Penelitian dan Definisi	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Hasil Penelitian	37
B. Hasil Uji Hipotesis	41
C. Pembahasan.....	44
D. Keterbatasan Penelitian	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	48
A. Simpulan.....	48
B. Implikasi.....	49
C. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tax Ratio Asia Pasifik 2022	4
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Tahun 2020-2022	7
Tabel 1.3 Penerimaan SPT Tahun 2020-2022	8
Tabel 2.1 Skema Program pengungkapan Sukarela.....	21
Tabel 3.1 Sampel Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Sebelum PPS Tahun 2020-2021.....	37
Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Sebelum PPS Dalam Bulanan	37
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Sesudah PPS Dalam Bulanan.....	39
Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sebelum PPS.....	40
Tabel 4.5 Uji Normalitas.....	42
Tabel 4.6 Uji Korelasi Variabel	43
Tabel 4.7 Uji Beda Sampel Berpasangan.....	43



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	29



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

April	38.534.539.077	32.124.634.678	-17%
Mei	44.367.389.309	48.642.611.175	10%
Juni	45.389.687.594	53.235.767.957	17%
Juli	36.331.713.646	58.927.045.191	62%
Agustus	47.081.764.706	49.511.675.272	5%
September	54.683.316.488	61.964.119.545	13%
Oktober	48.788.048.332	56.434.026.162	16%
November	60.978.681.106	72.660.352.267	19%
Desember	66.175.313.978	65.767.967.889	-1%
Total	544.533.725.931	621.326.820.303	14%

Sumber data: KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan dari table di atas dapat di lihat secara bulanan realisasi penerimaan pajak pada kpp Pratama Gianyar sebelum adanya PPS mengalami peningkatan yang bervariasi. Dilihat dari tabel diatas, kenaikan penerimaan pajak paling besar yaitu pada periode Juli meningkat mencapai 62%. Untuk penurunan penerimaan pajak paling besar yaitu pada periode April menurun sampai dengan 17%. Namun jika dilihat dari jumlah penerimaan pajak per tahun tetap mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Penerimaan Pajak Sesudah Penerapan Program Pengungkapan Sukarela

Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan pemerintah menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan pengampunan pajak yaitu dalam bentuk program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela yang dilaksanakan enam bulan dari bulan Januari 2022 sampai Juni 2022 ini diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak dengan masih banyaknya peserta pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan

pajak dan masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020, maka diharapkan dengan adanya program pengungkapan sukarela ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berikut tabel penerimaan pajak setelah penerapan PPS:

Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Sesudah PPS Dalam Bulanan

Bulan	Tahun 2022	Tahun 2023	Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Januari	52.106.593.277	61.877.946.268	19%
Februari	48.180.204.286	67.264.196.470	40%
Maret	63.286.635.616	68.849.535.482	9%
April	70.012.124.999	72.477.312.827	4%
Mei	64.760.053.344	66.925.218.525	3%
Juni	73.071.707.567	-	-
Juli	69.702.173.889	-	-
Agustus	55.728.012.786	-	-
September	68.079.467.262	-	-
Oktober	56.271.307.152	-	-
November	63.695.431.555	-	-
Desember	81.849.535.482	-	-
Total	766.743.247.215	337.394.209.572	

Sumber data: KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan dari tabel diatas dapat di lihat secara bulanan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Gianyar sesudah adanya PPS mengalami peningkatan yang bervariasi. Dilihat dari tabel diatas, kenaikan penerimaan pajak paling besar yaitu pada periode Februari yang meningkat mencapai 40%. Sampai dengan bulan Mei 2023 belum ada penurunan penerimaan pajak yang signifikan.

Dari tabel diatas dapat dilihat sebelum dan sesudah PPS dapat di lihat bahwa jumlah penerimaan pajak sesudah PPS mengalami peningkatan dilihat dari total penerimaan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp766.743.247.215 dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp621.326.820.303. Hal ini menunjukkan peningkatan pajak yang signifikan dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

3. Analisis Rasio Pertumbuhan

Analisis rasio pertumbuhan adalah teknik analisis yang digunakan untuk menunjukkan rasio kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam penerimaan pajak yang telah dicapai dari periode ke periode selanjutnya. Dimana hasil analisis rasio pertumbuhan penerimaan pajak sebelum penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sebelum PPS

No	Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak	Bulan	Realisasi Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Penerimaan Pajak
1	Jan-20	32.635.133.515	Jan-21	40.552.935.631	0,243
2	Feb-20	30.265.622.147	Feb-21	37.708.951.193	0,246
3	Mar-20	39.302.516.033	Mar-21	43.796.733.343	0,114
4	Apr-20	38.534.539.077	Apr-21	32.124.634.678	-0,166
5	Mei-20	44.367.389.309	Mei-21	48.642.611.175	0,096
6	Jun-20	45.389.687.594	Jun-21	53.235.767.957	0,173
7	Jul-20	36.331.713.646	Jul-21	58.927.045.191	0,622
8	Agu-20	47.081.764.706	Agu-21	49.511.675.272	0,052
9	Sep-20	54.683.316.488	Sep-21	61.964.119.545	0,133

10	Okt-20	48.788.048.332	Okt-21	56.434.026.162	0,157
11	Nov-20	60.978.681.106	Nov-21	72.660.352.267	0,192
12	Des-20	66.175.313.978	Des-21	65.767.967.889	-0,006

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai rasio pertumbuhan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan pemerintah yaitu berupa program pengungkapan sukarela (PPS). Dimana nilai rasio pertumbuhan terendah sebelum penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) pada KPP Pratama Gianyar yaitu sebesar -0,166 dengan nilai rasio tertinggi yaitu sebesar 0,622. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup baik mengingat pada tahun tersebut ekonomi masih terdampak oleh pandemi yang menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu dengan adanya pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah.

B. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini digunakan untuk analisis data yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak normal. Dimana uji normalitas ini merupakan syarat yang harus dilakukan untuk menggunakan statistic parametrik. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak normal, maka penelitian ini menggunakan uji *Shapiro-Wilk* dikarenakan sampel data yang diuji kurang dari 50 data. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan

data dianggap berdistribusi tidak normal jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Berikut uji normalitas data penerimaan pajak yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 Uji Normalitas
Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum_PPS	,093	11	,200*	,991	11	,998
Sesudah_PPS	,155	11	,200*	,945	11	,577

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas data penerimaan pajak sebelum program pengungkapan sukarela (PPS) menunjukkan bahwa nilai *Sig.* sebesar 0,998 lebih besar dibandingkan dengan 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan hasil uji normalitas untuk data penerimaan pajak sesudah program pengungkapan sukarela (PPS) menunjukkan bahwa nilai *Sig.* sebesar 0,557 lebih besar dibandingkan dengan 0,05 maka data berdistribusi normal.

2. Uji Beda T-test dengan Sampel Berpasangan (*Paired T-test*)

Uji beda T-test dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Berikut hasil uji beda *T-test* yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut:

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum_PPS	527,9727	11	120,91293	36,45662
	Sesudah_PPS	666,1182	11	73,49129	22,15846

Sumber: Data sekunder diolah 2023

Data dari tabel diatas menunjukkan nilai rata-rata (Mean) sesudah PPS lebih besar dibandingkan dengan sebelum PPS, sehingga sesudah diterapkannya PPS terbukti bisa meningkatkan penerimaan pajak. Dimana nilai rata-rata (Mean) sesudah PPS adalah 666,1182 dan nilai rata-rata (Mean) sebelum PPS adalah 527,9727.

**Tabel 4.6 Uji Korelasi Variabel
Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum_PPS & Sesudah_PPS	11	,345	,299

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2023

Adapun hasil Paired Samples Correlations yang didapatkan yaitu nilai *Sig.* sebesar 0,299 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,005 yang menunjukkan bahwa tidak memiliki korelasi atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum PPS dan penerimaan pajak sesudah PPS.

Tabel 4.7 Uji Beda Sampel Berpasangan

		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum_PPS - Sesudah_PPS	-138,14545	117,86622	35,53800	-217,32906	-58,96185	-3,887	10	,003

Dari hasil uji T-test diatas menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan penerimaan pajak yang signifikan antara sebelum diterapkannya PPS dan sesudah diterapkannya PPS.

C. Pembahasan

Hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) pada KPP Pratama Gianyar. Hasil analisis yang telah peneliti lakukan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS). Terdapat perbedaan pada penerimaan pajak yang menjadi indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini. Sehingga H1 diterima. Hal ini didukung dengan adanya kenaikan rata-rata penerimaan pajak sebelum diterapkannya PPS sebesar 527,9727 menjadi 666,1182 sesudah diterapkannya PPS. Terdapat kenaikan rerata penerimaan pajak yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkannya PPS yaitu sebesar 138,1455. Penelitian dari Wirawan dan Noviani (2017) juga menyatakan peningkatan kepatuhan wajib pajak juga mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Aisyaturrahmi (2022) yang menyatakan wajib pajak memberikan sikap positif dalam mengikuti PPS dan setuju meningkatkan penerimaan pajak untuk pemulihan kondisi ekonomi Indonesia. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Irawan et al, (2022) yang menyatakan jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS meningkat sebanyak 8.180 dan memberi dampak positif dalam peningkatan penerimaan pajak guna pemulihan ekonomi Indonesia.

Didukung hipotesis yang diuji ini sesuai dengan teori atribusi dimana teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang yang

ditentukan faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks kepatuhan pajak, faktor eksternal berasal dari kondisi eksternal individu seperti kebijakan pemerintah dalam hal ini yaitu kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS) sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan penerimaan pajak.

Banyaknya manfaat yang didapat wajib pajak dalam mengikuti program PPS ini menjadi salah satu faktor faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun manfaat mengikuti PPS bagi wajib pajak dalam Kebijakan I yaitu tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar) dan Data atau informasi yang berasal dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Manfaat lainnya mengikuti PPS yaitu tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap, data/informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Adanya kebijakan dalam PPS ini tentunya memberikan keuntungan bagi wajib pajak Badan dan wajib pajak Orang Pribadi yang sebelumnya telah mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I yaitu dengan memperbolehkan kembali untuk ikut

serta dalam Program Pengungkapan Sukarela (*Tax Amnesty* Jilid II). Hal ini tentunya merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak tersebut terlebih wajib pajak yang sebelumnya sudah pernah mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I dapat dikatakan memiliki pengalaman lebih sehingga dapat dijadikan gambaran untuk ikut serta kembali dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Keberadaan Program Pengungkapan Sukarela merupakan kesempatan langka yang mungkin tidak akan terjadi kembali di masa depan. Dikutip dari katadata.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tak akan lagi menggelar program serupa. Sri Mulyani memastikan akan meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum pajak. Menurut Sri Mulyani, data wajib pajak peserta *Tax Amnesty* Jilid II yang sudah dikumpulkan akan dimanfaatkan petugas pajak sebagai basis data untuk melakukan upaya kepatuhan dan penegakan hukum setelah program ini berakhir. Upaya meningkatkan kepatuhan yang dilakukan pemerintah ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan untuk meneliti kepatuhan pajak sebelum dan sesudah PPS yang menunjukkan terdapat perbedaan pada peningkatan penerimaan pajak yang menjadi indikator kepatuhan pajak dalam penelitian ini.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Dari berbagai keterbatasan ini diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu data amatan yang tersedia terbatas yang disebabkan karena program pengungkapan sukarela yang belum lama ini telah

selesai diberlakukan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela pada KPP Pratama Gianyar. Disamping itu keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis data uji T-test berpasangan saja dalam menganalisis data dan hanya membandingkan data sebelum dan sesudah diberlakukan program pengungkapan sukarela.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan pajak yang dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) pada KPP Pratama Gianyar. Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan program pengungkapan sukarela (PPS) pada KPP Pratama Gianyar. Hal ini didukung dengan hasil uji beda yang dilakukan menunjukkan menunjukkan nilai *Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan penerimaan pajak yang signifikan antara sebelum diterapkannya PPS dan sesudah diterapkannya PPS.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya manfaat yang didapat wajib pajak dan adanya kesempatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang sebelumnya telah mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I memiliki pengalaman lebih sehingga dapat dijadikan gambaran untuk ikut serta kembali dalam Program Pengungkapan Sukarela serta adanya pemulihan ekonomi setelah pandemi.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang telah didapat, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah pembendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya mengenai program pengungkapan sukarela (PPS) dengan kepatuhan wajib pajak.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama fiskus dalam membuat suatu kebijakan, agar dapat diikuti oleh para wajib pajak secara optimal.

C. Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Dari berbagai keterbatasan ini diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya pada satu lokasi yaitu KPP Pratama Gianyar. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau memperluas lokasi penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kepatuhan pajak sebelum diterapkannya program pengungkapan sukarela dan kepatuhan pajak sesudah diterapkannya program pengampunan pajak dengan indikator penerimaan pajak. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel dan

menambah indikator kepatuhan pajak seperti penerimaan SPT dalam penelitian selanjutnya.

3. Penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis data uji T-test berpasangan saja dalam menganalisis data dan hanya membandingkan data sebelum dan sesudah diberlakukan program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Gianyar. Untuk selanjutnya diharapkan diharapkan melakukan analisa dan uji yang lebih komprehensif dengan menggunakan analisis regresi.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ningtyas, A. S., & Aisyaturrahmi. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 51-62.
- Peilouw, C. T. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 5(2)*, 243 - 253.
- Aisanafi, Y., & Murdhaningsih. (2023). Kebijakan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela: Evaluasi dan Rekomendasi. *Jurnal Ilmu Siber*, 19-22.
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 706-716.
- Mahmud, M., & Mooduto, W. I. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 56-65.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi • Vol. 6 No. 1*, 39-51.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In Bandung : Alfabeta.
- Wirawan dan Noviari. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana vol. 21.3*.
- Utthavi, W. H., & Ayuni, N. D. (2019). Pengaruh Tax Amnesty pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata di Bali. *JURNAL BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL. 15, NO. 1*, 22-30.
- Aisanafi, Y., & Murdhaningsih. (2023). Kebijakan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela: Evaluasi dan Rekomendasi. *Jurnal Ilmu Siber Vol. 2 No.1*, 19-22.

- Arifin , S. B., & Syafi, I. (2019). PENERAPAN E-FILING, E-BILLING DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA. *9 Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5 (1) , 9-21.
- Gozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmud, M., Indra S, W., & Mooduto. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review, Volume 4 No. 1*, 56-65.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ngadiman, & Huslin. (2015). PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSIPAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02* , 225-241.
- Paenan, M. F. (2018). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PERPAJAKAN, DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya Vol 6, No 2*, 1-22.
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). IMPLEMENTASI TEORI ATRIBUSI UNTUK MENILAI PERILAKU KECURANGAN AKUNTANSI. *EKONOMI DAN BISNIS, Vol. 4 No. 1*, 41-66.
- Saputra, R., & Nurmantu, S. (2018). PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN TAHUN 2016. *JURNAL REFORMASI ADMINISTRASI Volume 5, No. 1*, 11-19.
- SARI, D. P. (2019). ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) PADA KPP PRATAMA DENPASAR . *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen Vol. 1, No. 1*, 1-19.
- Yeni, R. (2013). PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PADANG. *Jurnal Akuntansi Vol 1, No 1*, 1-14.

- Gunawan, A dan Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17, No. 3
- Dharma, G. P., & Suardana, K. A. (2014). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 340-353.
- Zulma, G. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 288-294.
- Hutagaol, John. (2007). Perpajakan: *Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Johanes, Rene. 2016. Analisis Efektivitas Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia Tahun 2016. Universitas Bakrie, Jakarta.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI